



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> Surel: Persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : **B-1/656/HK.02/X/2025** Jakarta, **23** Oktober 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Permenaker tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Sekretaris Negara
di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-259/M/D1/HK.03.00/06/2025 hal Kebijakan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Himbauan untuk Aktif Melakukan Pemantauan Program Prioritas Nasional, setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berdampak luas kepada masyarakat, bersifat strategis (berpengaruh pada program prioritas Presiden, target pemerintah pada RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan serta keuangan negara), dan/atau lintas kementerian/lembaga, dapat disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara sebelum ditetapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat kami menyampaikan Rancangan Permenaker tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan, naskah urgensi, dan surat keterangan telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari Kementerian Hukum, sebagaimana salinan dokumen terlampir yang dapat diakses pada tautan ini <https://bit.ly/RPermenakerPBBRNaskahUrgensiSuratSelesaiHarmonisasi>.

Rancangan Permenaker tersebut merupakan bagian dari stimulus kemudahan berusaha dan investasi, berdampak luas kepada masyarakat, bersifat strategis (berpengaruh pada program prioritas Presiden dan keuangan negara) serta lintas kementerian/lembaga, sehingga perlu disampaikan sebelum dilakukan penetapan.

Atas perhatian Bapak Menteri Sekretaris Negara, kami mengucapkan terima kasih.


a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Sekretaris Jenderal
Dr. Gris Kuntadi, S.E., M.M.
NIP 19690624 199003 1 004

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Hukum;
3. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan
4. Deputi Bidang PUU dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B -1 / 1030 / HK . 02 / XI / 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

18 November 2025

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

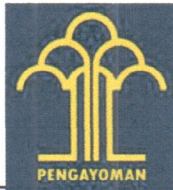
Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.
NIP 19690624 199003 1 004

Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5265417, Faksimile: (021) 5265480
Laman: www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, Pos-el: humas.djpp@gmail.com

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Kamis, 16 Oktober 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II

Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/818/HK.02/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan yang dihadiri oleh Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian;
2. bahwa substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri ini.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

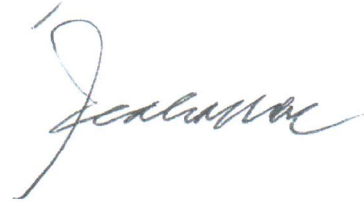
Jakarta, 16 Oktober 2025

Pemrakarsa,



Reni Mursidayanti, S.H., M.H.

Pembina Tim Harmonisasi,



Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.

Mengetahui,

Direktur Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan II,



Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Jakarta, 20 Oktober 2025

Nomor : PPE.PP.01.05-4298
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di-
Jakarta

Menindaklanjuti Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/818/HK.02/X/2025 Tanggal 1 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan atau materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses Harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.